

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INTI SARI

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana realita suatu proses perencanaan pembangunan di daerah dan dampaknya terhadap efektivitas program. Munculnya fenomena yang dijumpai dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa tidak antusiasnya pelaku UKM terhadap program yang diperuntukan bagi mereka, merupakan indikasi adanya masalah dalam *setting* program dan realitanya. Realita penyusunan program dan anggaran pada program UKM di lingkungan Pemerintah Daerah ternyata tidak membawa muatan partisipasi pelaku UKM secara ideal, sehingga akhirnya pada tahap pelaksanaan, program tidak menjawab masalah atau kebutuhan masyarakat pelaku UKM.

Penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilaksanakan dengan mengambil data primer melalui observasi langsung dan wawancara dengan pelaku UKM, aparat pelaksana pada instansi penyusun program dan anggaran pembangunan serta pada instansi pengelola/pelaksana program, pihak lain (*stake holder*) program seperti Business Development Service (BDS) Provider, aparat pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan perangkat desa.

Hasil penelitian menunjukkan mengapa partisipasi masyarakat pelaku UKM tidak dapat terakomodasi secara ideal dalam proses perencanaan program dan anggaran. Faktor pelaku dan tahapan proses merupakan faktor yang cukup berpengaruh yang mengakibatkan partisipasi masyarakat terpinggirkan atau hilang dalam program UKM. Masyarakat pelaku UKM yang sering skeptis menanggapi forum-forum perencanaan, aparat pemda yang terbatas kemampuan teknis dan komitmennya, otoritas pengambil kebijakan yang tidak selalu mencermati kebutuhan nyata masyarakat menjadi penyebab munculnya program UKM yang tidak menjawab kebutuhan pelaku UKM. Panjangnya proses dilihat dari sisi waktu dan tahap juga menyebabkan berubah wujud atau bahkan hilangnya muatan partisipasi dalam program tersebut.

Diperlukan komitmen yang kuat di kalangan birokrasi untuk dapat mengubah pola *top down* menjadi *bottom up* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perubahan *mind set* aparat birokrasi untuk berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan.

Kata kunci : Partisipasi masyarakat, Perencanaan dan Efektivitas Program Pembangunan, Komitmen Pemerintah.

Participative Planning on Empowerment Program of Small and Medium Enterprise (SME) in Sleman Regency, Yogyakarta Special Province

Abstract

This research aims to show how the development planning process influences the program effectiveness. Phenomenon of unenthusiastic actors of Small and Medium Enterprise to the program indicates some problems in program setting or program execution. In fact there is no participation of actor of Small and Medium Enterprise involve in the planning processes. The result is the program going to be failed because of the non participative programming process.

The research conducted a field research and library. The field research obtained the primary data based on the interview with SME actor, development planner of the regency/district, sub district, village and hamlet, program executer, Business Development Service Provider.

Although the community participatory mechanism has adopted in empowerment program of SME, in fact there are some errors in the process that never occur to the mechanism. The research found several reasons on why community participation can not be accommodated in such planning process. Incapable and non committed person, politician preferences and a local administrative which does not work properly in such many steps are the main reason why participation is disappearing at the planning process. Step by step there is no participation of SME actor is left. Community participation fades away in the process. Because of such reason, SME actor can't recognize the program whether that program was developed for them, finally they show unenthusiastic respond.

Local Government commitment is needed to change top down to bottom up system not only by the procedural and formally mechanism but through deep substantial participation. At last the empowerment program of small and medium enterprise can be effective by the changes of mentally attitude of all bureaucracy actors.

Key word : Community participation, Planning and Program Effectiveness, Local Government Commitment.

DAFTAR SINGKATAN

UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
PDRB	: Product Domestic Regional Bruto
DIY	: Dearth Istimewa Yogyakarta
Musbangdes	: Musyawarah Pembangunan Desa
UDKP/Musrenbangcam	: Unit Daerah Kerja Pembangunan / Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Musrenbangkab	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten
P2KPM	: Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal
BPKKD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
RPJP / Propenas	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang / Program Pembangunan Nasional
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Pendek
AKU	: Arah Kebijakan Umum
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Renstra	: Perencanaan Strategis
RKPD	: Recana Kerja Pemeintah Daerah
Kepmendagri	: Keputusan Menteri Dalam Negeri
Perda	: Peraturan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RASK	: Rancangan Anggaran Satuan Kerja
DASK	: Daftar Anggaran Satuan Kerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Perusahaan Besar – UKM di Indonesia th. 2001 –

2002

Tabel 1.2. Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja UKM di Propinsi DIY th.2003

Tabel 1.3. Kondisi UKM di Kabupaten Sleman th.2003

Tabel 1.4. Tata Guna Tanah di Kabupaten Sleman

Tabel 1.5. Kinerja Ekonomi Kabupaten Sleman th.2000 – 2003

Tabel 1.6. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Th.2000 – 2003

Tabel 1.7. Kinerja Industri Pengolahan Kabupaten Sleman Th.2001 –

2004

Tabel 1.8. Perkembangan Perkoperasian Kabupaten Sleman Th.2000 –

2004

DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1. Ketentuan Pemkab tentang Proses Program Pembangunan
- Diagram 2. Proses Penyusunan Program dan Anggaran UKM
- Diagram 3. Realita Perencanaan dan Penganggaran Program UKM

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 - Kondisi Perekonomian Kabupaten Sleman th.2003

Lampiran 3 - Bagan Alir Proses Perencanaan Program Pembangunan
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Lampiran 4 - Bagan Alir Proses Penentuan Strategi dan Prioritas APBD
sesuai Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002

Lampiran 5 - Contoh Program dan Kegiatan Pemberdayaan dan
pengembangan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas P2KPM
Kabupaten Sleman th. 2003 dan 2004